

BAB II

TINJAUAN UMUM PARTAI POLITIK; PENGERTIAN PARTAI POLITIK HINGGA DINAMIKA PARTAI DI INDONESIA

A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Partai Politik

Partai politik merupakan instrument yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi di Negara maupun di dunia ini. Sebuah Negara bahkan dikatakan tidak demokratis jika tidak terdapat partai politik di dalamnya. Karena, pada hakikatnya partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Oleh sebab itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna.

Dari sisi etimologis, Maurice Duverger menyebutkan bahwa kata partai berasal dari bahasa latin *pars* yang berarti bagian.¹ Dari pengertian ini, kemudian dapat dipahami bahwa karena ia merupakan suatu bagian, maka pasti ada bagian-bagian yang lain. sehingga, untuk memenuhi pengertian tersebut maka idealnya tidak mungkin dalam suatu Negara hanya terdapat satu partai. Selain itu, Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa partai berasal dari bahasa Inggris *part* yang berarti bagian atau golongan. Menurutnya, kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan. Pengelompokan itu sendiri berupa organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti

¹ Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*, terj. Laila Hasyim, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1984), h. 4

organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, serta organisasi politik. Adapun dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat di bidang politik.²

Banyak sarjana yang memberikan pengertian terhadap partai politik, diantaranya ialah Mac. Iver³ yang memberikan perumusan partai politik⁴ sebagai perkumpulan yang diorganisasikan untuk mendukung suatu asas atau perumusan kebijaksanaan yang menurut saluran-saluran konstitusi dicoba menjadikannya sebagai dasar penentu bagi pemerintahan.⁵ Selain itu, partai politik menurut Miriam Budiardjo diartikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.⁶ Adapun menurut Robert K. Carr partai politik disebut sebagai suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah.⁷

Edmund Burke mendefinisikan partai politik sebagai satu kesatuan struktur organisasi yang bertujuan untuk menyebarluaskan usaha-usaha yang telah menjadi kesepakatan di antara mereka untuk kepentingan nasional. Dengan cara yang sama, Ware mengambil kesimpulan bahwa partai politik merupakan sebuah

² Muhammad Ali Safa'at, *Pembubaran partai politik; pengaturan dan praktik pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 31

³ Mac Iver memiliki nama lengkap Robert Morrison Mac Iver, merupakan seorang sosiolog dan ilmuwan politik kelahiran Skotlandia 17 April 1882 dan meninggal pada 15 Juni 1970. Lihat <https://biography.yourdictionary.com> di akses pada 23 Mei 2019

⁴

⁵ H. Abu Daud Bushroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 155

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: penerbit Gramedia, 1988), h. 38

⁷ "political Party is an organization that attempts to achieve and maintain control of government", lihat Robert K. Carr, Mervin H. Bernstein, Walter F. Murphy, *American Democracy in Theory and Practice: Essentials of National, State, and Local Government*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc, 1965)

lembaga yang mempengaruhi Negara dengan cara menguasai jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Biasanya, partai politik mempunyai lebih dari sekedar satu kepentingan dan mencoba memperjuangkan kepentingan tersebut.⁸

Sigmund Neumann menjelaskan bahwa partai politik adalah aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan-golongan atau golongan-golongan lain yang memiliki pandangan berbeda. Sedangkan menurut R.H Soltau mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, dengan tujuan untuk menguasai pemerintah, dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. adapun bagi Budirdjo, partai politik adalah sebuah kelompok yang terorganisir dimana anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini sendiri ialah mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional demi melaksanakan kepentingan (kebijakan) mereka.⁹

Sejalan dengan itu, pengertian partai politik juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, yaitu partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

⁸ Al-Hamdi Ridho, *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 7

⁹ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 102

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹⁰

Kelahiran partai politik sedianya adalah buah dari pertarungan ideologi antar kekuatan yang ada dalam masyarakat. Ia muncul sebagai representasi kepentingan warga Negara.¹¹ Partai politik pertama kali lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai politik biasa disebut sebagai pilar demokrasi, karena mereka memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan Negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizens*).¹² Parpol dalam sejarahnya, munculnya partai-partai politik di Negara yang satu dengan negara yang lain tidak selalu sama, akan tetapi, satu benang merah yang mempertemukannya yaitu bahwa kemunculan partai-partai itu berbanding lurus dengan tumbuhnya proses demokratisasi, khususnya yang berkaitan dengan kesamaan hak antar warga negara. Sebagaimana digaris bawahi oleh Evereth Call Ladd seperti yang dikutip oleh Kacung, partai politik merupakan '*children of egalitarianism*', yang menyebabkan partai politik menjadi satu pilar dari demokrasi yang harus abadi dalam suatu Negara modern.¹³

Di Indonesia, pada era kolonial partai-partai dibentuk untuk mencari dan merumuskan identitas nasional di satu pihak, dan dalam rangka memperkuat

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Partai Politik*, UU Nomor 2 Tahun 2011, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 8. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189

¹¹ Firman Subagyo, *Menata Partai Politik dalam Arus Demokrasi*, (Jakarta: RMBOOKS, 2009) h. 57

¹² Efriza, Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*, (Malang: Intrans Publishing, 2005), h. 352

¹³ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 59

perjuangan merebut kemerdekaan di pihak lain. karena itu tidak mengherankan jika ideologi-ideologi besar seperti islamisme, nasionalisme, dan Marxisme mendasari pembentukan partai pada periode kebangkitan nasional. Meskipun menjadi wadah aspirasi dari kelompok dan atau golongan ideologis yang berbeda-beda, partai-partai pada era kolonial turut memberikan kontribusi bagi pencarian sekaligus penemuan identitas keindonesiaan yang mendasari pembentukan Republik.¹⁴

Selain itu, munculnya partai politik tidak lepas dari terciptanya iklim kebebasan yang luas bagi masyarakat pasca runtuhnya pemerintahan kolonial belanda. Kebebasan tersebut kemudian memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk organisasi, termasuk partai politik. Sebelum kemerdekaan Indonesia, cikal bakal kemunculan partai politik sudah ada, yaitu melalui tumbuhnya gerakan-gerakan yang tidak saja dimaksudkan untuk memperoleh kebebasan yang lebih luas dari belanda, melainkan juga menuntut adanya kemerdekaan, seperti Partai Sarikat Islam Indonesia, Indische Partij, ISDV (Cikal bakal PKI), dan PNI.¹⁵

Selain di dorong oleh adanya iklim demokrasi yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda, kemunculan partai-partai politik di Indonesia juga tidak lepas dari karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk. Sebagaimana dikatakan oleh John Furnival bahwa masyarakat Indonesia atau pemerinah hindia Belanda ketika itu merupakan masyarakat yang plural, yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan satu sama lain. hanya saja, menurut Furnivaldi antara mereka itu

¹⁴ Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 21

¹⁵ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, h. 60

tidak pernah bertemu di dalam satu unit politik, namun realitas di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat yang majemuk itu pada akhirnya bergabung dalam satu unit politik besar yang dinamakan partai politik.¹⁶

B. Fungsi dan Peran Partai Politik

Partai politik sering disebut sebagai salah satu pilar demokrasi. Keberadaan partai politik merupakan pengakuan atas adanya kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat. Namun demikian, keberadaan partai politik secara kuantitatif saja tidak dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan demokratisasi di suatu Negara, melainkan partai politik juga harus mampu menjalankan fungsinya dan berkompetisi dalam pemilihan umum.¹⁷

Urgensi atau pentingnya partai politik di Negara demokrasi adalah untuk menyelenggarakan fungsi sebagai sarana sosialisasi politik dan rekrutmen politik. Sedangkan dalam aplikasi dan proses sosialisasi politik dan rekrutmen politik itu tergantung pada komunikasi politik. Demikian juga komunikasi politik berperan dalam aktivitas partai politik yang pada umumnya berupa pemikiran politik, pembicaraan politik, dan tindakan politik.¹⁸

Secara garis besar menurut Firmanzah, Fungsi dan Peran parpol dapat dibedakan menjadi dua, *Pertama*, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi parpol memerankan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pemilihan parpol. *Kedua*, parpol juga bersifat eksternal organisasi. Di sini fungsi dan peran organisasi parpol terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan

¹⁶ Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*, h. 23

¹⁷ Edison Muchlis, *Pelebagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta: LIPI Press, 2007), h. 3

¹⁸ Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 94

Negara. Kehadiran parpol juga memiliki tanggung Jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.¹⁹

Disamping itu, dalam menjalankan fungsinya, Mochtar Mas'od sebagaimana yang dikutip oleh A. Rahman, bahwa partai politik akan ikut ditentukan oleh kelompok-kelompok dan tujuan yang ingin dicapai. Suatu partai revolusioner akan berjuang untuk merubah seluruh tatanan organisasi pemerintahan, kebudayaan masyarakat, dan sistem ekonomi dari suatu kondisi; dan apabila berhasil ia mungkin mengendalikan setiap kegiatan penting dalam masyarakat itu. Sedangkan suatu partai konservatif dan tradisional akan berusaha mempertahankan keadaan seperti apa adanya.²⁰ Lebih lanjut lagi A. Rahman menjelaskan bahwa fungsi partai politik yang melekat dalam suatu partai politik meliputi:

a. Sosialisasi politik

Yaitu fungsi sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari kanak-kanak hingga dewasa.

b. Partisipasi politik

Yaitu fungsi yang dimiliki oleh partai politik untuk mendorong masyarakat agar ikut aktif dalam kegiatan politik. Biasanya dilakukan melalui indoktrinasi

¹⁹ Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), h. 362

²⁰ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, h. 103

Ideologi, platform, asas partai kepada anggota masyarakat yang ada dalam jankaun partainya.²¹

c. Komunikasi politik

Fungsi ini adalah fungsi untuk menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengatunya sedemikian rupa, sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.²²

d. Artikulasi kepentingan

Adalah fungsi menyatakan atau menyampaikan (mengartikulasi) kepentingan konstituen (masyarakat) kepada badan-badan politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama. Bentuk artikulasi yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada anggota dewan kota, parlemen, pejabat pemerintah atau dalam masyarakat tradisional kepada kepala desa atau ketua suku. Idealnya, fungsi ini menjadi tugas partai politik untuk mengartikulasikannya.²³

e. Agregasi Kepentingan

Yakni menjadi fungsi partai politik untuk memadukan semua aspirasi yang ada dalam masyarakat, yang kemudian dirumuskan sebagai program politik dan diusulkan kepada badan legislatif dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar menawar dengan kelompok-

²¹ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, h. 103

²² A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, h. 104

²³ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*,h. 104

kelompok kepentingan, dengan menawarkan pemenuhan kepentingan mereka jika kelompok kepentingan tersebut mau untuk mendukung calon tersebut.

f. Pembuat Kebijakan

Fungsi ini adalah fungsi yang dimiliki partai politik setelah partai politik meraih dan mempertahankan kembali kekuasaan di dalam pemerintahan secara konstitusional. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan di lembaga eksekutif maupun legislatif. Setelah memperoleh kekuasaan ini, maka partai politik memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijakan yang akan digunakan dalam suatu pemerintahan.²⁴

Sedangkan menurut pendapat Sigmund Neumann sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Hanif, partai politik dalam nega demokrasi memiliki empat fungsi, yaitu: *pertama*, partai mengatur kehendak umum yang kacau; *kedua*, mendidik warga Negara untuk bertanggung jawab secara politik; *ketiga*, menjadi penghubung antara pemerintah dengan pendapat umum; dan *keempat*, memilih para pemimpin.²⁵

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 11, dijelaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana sebagai berikut:

1. Pendidikan politik bagi masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat

²⁴ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, h. 104

²⁵ Ahmad F. Hanif, *Partai Politik Lokal di Aceh – Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, (Jakarta: Kemitraan, 2018), h. 12

3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.²⁶

Fungsi partai politik dari dimensi rekrutmen politik mengantarkan partai politik untuk mempersiapkan calon presiden dari partainya. Disebutkan disini bahwa rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Dari sini, partai politik memiliki peranan pengiring di dalam mempersiapkan kader partai atau figur nasional untuk dicalonkan dalam proses pemilihan presiden.²⁷

Menurut Amin Ibrahim sebagaimana yang dikutip oleh Yoyoh Rohaniah, peran utama parpol adalah memenuhi hakikatnya sebagai bagian terpenting dari infrastruktur politik dan hakikatnya sebagai organisasi sosial politik yang bersifat sukarela, yaitu peran sebagai mediator antar konstituennya (masyarakat pada umumnya) untuk menyalurkan aspirasi mereka kepada suprastruktur politik. Peran ini dilakukan melalui tindakan aktualisasi, yakni dengan cara mengemas aspirasi tersebut secara nyata, menyatakannya dan kemudian mengagresikannya (mendesaknya), sehingga suprastruktur politik diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat tersebut.²⁸

²⁶ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

²⁷ Sahid Gatara, *Ilmu Politik (Memahami dan menerapkan)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h.200

²⁸ Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*, h. 364

C. Klasifikasi Partai Politik

Klasifikasi partai politik dapat dibagi menjadi 3, yaitu

1. Dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, partai politik terbagi menjadi:

a. Partai Massa

Partai massa ialah partai yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, oleh karena itu biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang memiliki ideologi dan tujuan yang sama. Kelemahan dari partai ini adalah bahwa masing-masing aliran atau kelompok yang menjadi anggotanya cenderung untuk memaksakan kepentingan masing-masing, sehingga persatuan partai menjadi lemah atau hilang sama sekali, sehingga salah satu golongan memisahkan diri dan mendirikan partai baru.²⁹

b. Partai Kader

Partai kader yaitu suatu partai yang mengandalkan kader-kadernya untuk loyal. Pendukung partai ini tidak sebanyak partai massa karena memang tidak mementingkan jumlah, partai lebih mementingkan disiplin anggota dan ketaatan dalam berorganisasi. Adapun doktrin dan ideology haruslah tetap terjamin kemurniannya, sehingga bagi anggota yang menyeleweng akan dipecat keanggotaannya.³⁰ Menurut Rahman,

²⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 42

³⁰ Haryanto, *Mengenal teori-teori politik*, (Depok: tt, 2005), h. 568

kekuatan dari partai ini terletak pada keketatan organisasi disiplin kerja dari anggota-anggotanya.³¹

2. Dari segi sifat dan orientasi, partai politik terdiri atas:

a. Partai Lindungan (*Patronage Party*)

Partai lindungan umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor (sekalipun organisasi di tingkat lokal cukup ketat), disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Maksud utamanya ialah memenangkan pemilihan umum untuk anggota-anggota yang dicalonkannya; sehingga hanya giat menjelang masa-masa pemilihan umum. Contohnya ialah seperti partai Demokrat dan partai Republik di Amerika Serikat.³²

b. Partai Ideologi atau Partai Azas

Ideologi memiliki arti yang bermacam-macam, diantaranya menurut Ali Syariati, yang menjelaskan ideologi sebagai sebuah disiplin ilmu yang berkaitan dengan keyakinan dan cita-cita.³³ Lebih luas lagi, pengertian ideologi menurut Steger—sebagaimana yang dikutip oleh Firmansyah—bahwa ideologi merupakan sistem sebaran ide, kepercayaan yang membentuk sistem nilai dan norma, serta peraturan ideal yang diterima sebagai fakta dan kebenaran oleh kelompok tertentu.³⁴

³¹ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, h. 105

³² Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 489

³³ Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 238

³⁴ Firmansyah, *Mengelola Partai Politik, Komunikasi, Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), h. 96

Lebih lanjut lagi Firmansyah menjelaskan bahwa ideologi dicirikan oleh, *pertama* ideologi politik berkaitan dengan pertanyaan siapa yang akan menjadi pemimpin? Bagaimana mereka dipilih, dan dengan prinsip-prinsip apa mereka memimpin? Hal inilah yang nantinya akan berkaitan dengan seperti apa pemimpin yang layak untuk memimpin masyarakat banyak, apakah yang dipertimbangkan religiusitasnya, jiwa sosialnya, kekayaannya, kemampuan akademiknya, fisik dan penampilannya, suku atau etnisnya, atau jenis kelaminnya. *Kedua*, ideologi mengandung banyak sekali argument untuk persuasi atau melawan ide-ide berlawanan. Dan *ketiga*, ideologi yang sangat banyak mempengaruhi aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek kehidupan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan sebagainya.³⁵

Partai ideologi atau partai azas (Sosialisme, Fasisme, Komunisme, Islam, Kristen-Demokrat) biasanya memiliki pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat. Adapun calon anggotanya diadakan saringan, sedangkan untuk menjadi anggota pimpinan disyaratkan lulus melalui beberapa tahap percobaan. Adapun untuk memperkuat ikatan batin dan kemurnian ideologi, maka dipungut iuran secara teratur dan disebar organ-organ partai yang memuat ajaran-ajaran serta keputusan yang telah dicapai oleh pimpinan.³⁶

³⁵ Firmansyah, *Mengelola Partai Politik, Komunikasi, Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, h. 97

³⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 43

Jika dilihat dari segi ideologinya, partai politik terbagi menjadi partai politik yang berideologi Islam (partai Islam), partai politik berideologi Nasionalis sekuler, partai yang berideologi nasionalis religius, serta partai yang berideologi Kristen.³⁷

1) Partai Islam

Partai politik Islam, menurut Sudirman Tebba haruslah memiliki ciri Islam pada salah satu tiga unsur, yaitu nama, asas, dan lambang. Lebih lanjut lagi ia menjelaskan bahwa suatu partai dapat dikatakan sebagai partai Islam apabila namanya mengandung unsur Islam atau asasnya Islam, dan lambangnya mengandung ciri-ciri Islam.³⁸ disamping itu, dikategorikannya partai tersebut sebagai partai Islam ditandai oleh adanya personalia kepemimpinan partai yang didominasi oleh orang-orang yang berlatang belakang Islam yang kuat, serta pengambilan keputusan yang cenderung berpihak kepada kepentingan unsur Islam.

Tujuan didirikannya partai politik Islam tidak terlepas dari sebuah institusi negara sebagai media bagi partai politik Islam untuk mewujudkan cita-cita besar Islam. adapun tujuan besarnya dirumuskan dalam salah satu ayat yang berbunyi *baladun thayyibûn wa rabbun ghafûr* (terwujudnya sebuah Negara yang terdiri atas masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan yang diridhai oleh Allah Swt).³⁹

³⁷ Imam Yudhi Prasetya, Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik, dalam *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Volume 1, No. 1, Tahun 2011, h. 36

³⁸ Sudirman Tebba, *Islam Oasca Orde Baru*, (Yogya: PT. Tiara Wacana Yogya, 2001), h. 18

³⁹ Ridha al-Hamdi, *Partai Politik Islam; Teori dan Praktek di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 11

2) Partai Nasionalis Sekuler

Partai nasionalis sekuler atau yang lebih dikenal dengan partai Nasionalisme adalah partai yang AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga)nya tidak menyebutkan istilah-istilah Islam atau nilai-nilai ajaran agama.⁴⁰

3) Partai Nasionalis Religius

Partai Nasionalis Religius merupakan partai yang tidak menyebutkan Islam secara eksplisit, akan tetapi dalam AD/ ART nya mencantumkan tentang nilai-nilai agama dan moral.

4) Partai Kristen

Partai Kristen yakni Partai Kristen yakni partai yang di dalam AD/ ART nya secara eksplisit menyebutkan nilai-nilai, istilah-istilah, atau ajaran-ajaran dalam agama Kristen.⁴¹

3. Dari segi jumlah sistem partai yang ada dalam suatu Negara.

Dalam ilmu politik, sistem kepartaian dimaknai sebagai suatu kumpulan partai yang saling berhubungan dalam satu pola partai tertentu. Suatu Negara dapat dikatakan memiliki sistem kepartaian apabila memenuhi persyaratan tertentu.⁴² Menurut teori politik konvensional, sistem kepartaian di bedakan berdasarkan pengelompokan jumlah partai

⁴⁰ Imam Yudhi Prasetya, Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik, dalam *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, h. 37

⁴¹ Imam Yudhi Prasetya, Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik, dalam *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, h. 37

⁴² Rahmad Bahari, *Partai dan Kita*, (Jakarta: IPCOS dan FES, 2001), h. 5

dan polarisasi yang mendasarinya. Sehingga dengan mengacu pada teori ini terdapat istilah *single party*, *dwi party*, dan *multi party*.⁴³

a. Sistem partai tunggal (*One-Party System/ single party*)

Sistem ini digunakan oleh Negara yang baru merdeka, Negara multi etnis, dan Negara komunis. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya gejolak-gejolak sosial politik yang menghambat usaha-usaha pembangunan atau untuk mengintegrasikan aneka golongan yang ada dalam suatu Negara. Partai tunggal yang dimaksud ialah bahwa dalam satu Negara hanya ada satu-satunya partai politik yang mempunyai kedudukan Negara di antara partai lain/ beberapa partai lainnya. sehingga tidak ada kompetisi partai politik dalam pemilu. Adapun partai tunggal serta organisasi yang bernaung di bawahnya berfungsi sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat dan menekankan perpaduan dari kepentingan partai dengan kepentingan rakyat secara menyeluruh.⁴⁴

b. Sistem Dwi Partai (*Two Party System*)

Sistem ini diartikan bahwa dalam suatu Negara menganut dua partai politik atau adanya beberapa partai tetapi hanya dua partai yang memiliki peranan dalam Negara. Dalam sistem partai ini, partai terbagi menjadi dua, *pertama* partai yang berkuasa (menang dalam pemilu) dan *kedua* partai oposisi (kalah dalam pemilu). Partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama yang setia (*loyal opposition*) terhadap partai pemenang pemilu di

⁴³ Rahmad Bahari, *Partai dan Kita*, h. 5

⁴⁴ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, h. 106

pemerintahan. Dalam pemilu kedua partai ini berusaha meraih suara pemilih terapung/ mengambang (*floating vote*). Sistem dwi partai pernah disebut “*a Convenient system for contented people*” dan memang kenyataannya ialah bahwa sistem dwi partai dapat berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu:

- 1) Komposisi masyarakat adalah homogeny (*social homogeneity*)
- 2) Konsensus dalam masyarakat mengenai azas dan tujuan sosial yang pokok (*political consensus*) adalah kuat
- 3) Adanya kontinuitas sejarah (*Historical Continuity*).⁴⁵

c. Sistem Multi Partai (*Multi-Party Sistem*)

Sistem multi partai lahir karena adanya aneka ragam suku, agama, ras dan golongan yang ada dalam suatu Negara, seperti di Indonesia. Dalam sistem ini tidak ada partai politik yang memiliki suara mayoritas di parlemen, oleh karenanya harus melakukan koalisi agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil.

Dalam implementasinya, pemerintahan yang demikian ini haruslah selalu menggunakan musyawarah dan kompromi. Polamulti partai umumnya diperkuat oleh sistem perwakilan berimbang (*proportional Representation*) yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai dan golongan-golongan kecil. Melalui sistem ini, partai-partai kecil dapat menarik keuntungan dari ketentuan bahwa kelebihan suara yang diperolehnya di suatu daerah pemilihan dapat ditarik ke daerah

⁴⁵ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, h. 107

pemilihan lain untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan.⁴⁶

Pembangunan sistem multipartai, telah diberlakukan di Indonesia sejak pemilu 1999 melalui *electoral rules*, yaitu diperkenalkannya *electoral threshold*. Dalam literature mengenai sistem pemilihan (*electoral system*), *threshold* berarti dukungan suara minimal yang harus dimiliki oleh partai atau seseorang untuk memperoleh kursi di parlemen. Batasan demikian, menurut Reynolds bisa disebutkan dan dipaksakan secara formal di dalam aturan pemilu (*formal threshold*) maupun yang tercermin dari penghitungan *de-facto* secara matematis (*effective threshold*).⁴⁷ Mekanisme inilah yang kemudian dikatakan Kacung memiliki tujuan untuk menciptakan sistem perwakilan dan sistem kepartaian yang stabil, yang pada akhirnya sistem ini diyakini mampu membawa pemerintahan yang lebih stabil dan efektif.⁴⁸

⁴⁶ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, h. 107

⁴⁷ Andrew Reynolds dan Ben Reilly, *The International IDEA Handbook of Electoral System Design*, (Stockholm, IDEA, 1997), h. 21

⁴⁸ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, h. 73

